

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**(LKJIP)**

TAHUN 2025



KECAMATAN KERTANEGARA  
KABUPATEN PURBALINGGA

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Kecamatan Kertanegara telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kertanegara, Januari 2026  
Camat Kertanegara



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Kertanegara Tahun 2025 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban /akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Kertanegara tahun 2025-2029. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Kertanegara dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 1.448.365.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.334.725.887,00,- atau mencapai 92,15 % Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dari 1 (satu) indikator sasaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2025 adalah **Sangat Tinggi**

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kertanegara telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga. Dalam pelaksanaan tugas dan

fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	v
Daftar Lampiran .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Gambaran Umum .....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang.....	1
2. Kondisi Umum Kecamatan.....	1
3. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
<b>B. Maksud dan Tujuan.....</b>	<b>9</b>
<b>C. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>9</b>
<b>BAB II PERENCANAAN KINERA .....</b>	<b>11</b>
<b>A. Rencana Strategis.....</b>	<b>11</b>
<b>B. Indikator Kinerja Utama ( IKU ).....</b>	<b>11</b>
<b>C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....</b>	<b>12</b>
<b>D. Anggaran Tahun 2024.....</b>	<b>13</b>
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>15</b>
<b>A. Capaian Kinerja Perangkat daerah.....</b>	<b>15</b>
<b>B. Realisasi Anggaran.....</b>	<b>28</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>32</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM**

##### **1. Latar Belakang**

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kertanegara Tahun 2025 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Kertanegara Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kertanegara Tahun 2025. Dalam Laporan Kinerja juga disajikan pencapaian sasaran atas realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran.

##### **2. Kondisi Umum Kecamatan Kertanegara**

###### **a. Luas Wilayah**

Wilayah Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga seluas 3.802.000 ha, dari luas wilayah tersebut yang merupakan lahan sawah sekitar 1.103.000 ha atau sekitar 29% dari wilayah

Kecamatan Kertanegara sedangkan sisanya sebesar 2.699.000 ha merupakan lahan kering. Di Kecamatan Kertanegara terdapat 11 desa.

b. Kondisi Demografi

Kecamatan Kertanegara dengan penduduk sebesar 39.811 jiwa dimana untuk jumlah penduduk laki-laki berjumlah 20.398 jiwa (51,23%) dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 19.413 jiwa (48,77 %).

c. Pegawai pada Kecamatan Kertanegara

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, jumlah pegawai di Kecamatan Kertanegara pada tahun 2025 adalah sebanyak 10 orang dengan rincian sebagai berikut :

- PNS : 7 orang
- Tenaga kontrak : 3 orang

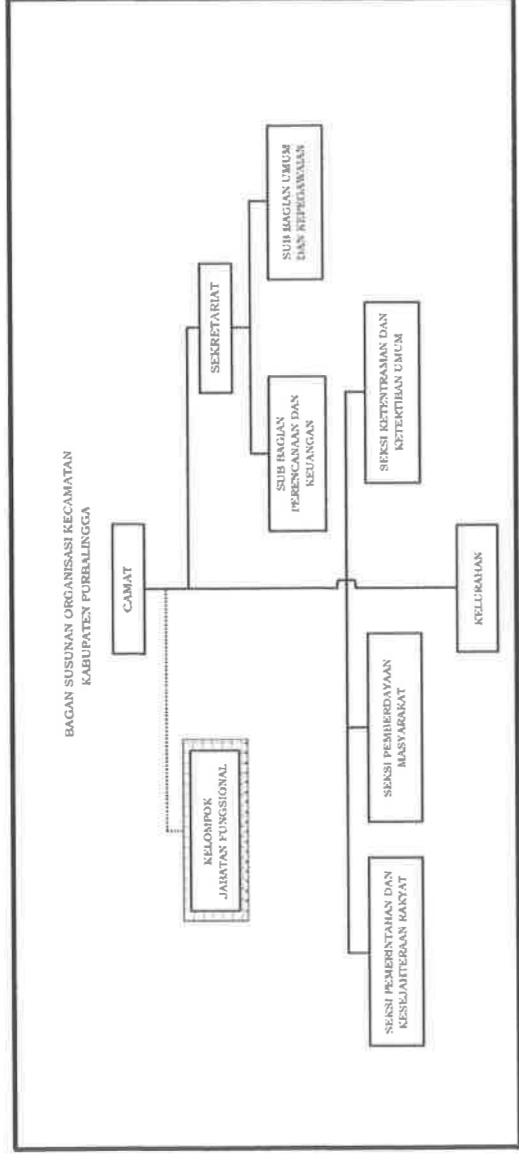
### 3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan.

Kecamatan Kertanegara dibentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Purbalingga Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan perangkat daerah tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan.

Tugas pokok Kecamatan Kertanegara selaku perangkat daerah adalah melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kecamatan Kertanegara merupakan perangkat daerah pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Purbalingga mempunyai struktur susunan organisasi sesuai Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2026 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Purbalingga

Gambar 2.1  
 Bagan Organisasi Kecamatan.Kertanegara



Struktur Jabatan pada Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

- a. Camat = Eselon III.a
- b. Sekretaris Kecamatan = Eselon III.b
- c. Kasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat = Eselon IV.a
- d. Kasi Pemberdayaan Masyarakat = Eselon IV.a
- e. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum = Eselon IV.a
- f. Kepala Subbagian Keuangan = Eselon IV.b
- g. Kepala Subbagian Umum = Eselon IV.b

Uraian tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

**1. Camat**

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,

- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan.
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
- i. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekda;
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi yang meliputi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan,
- d. Pemberdayaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan;
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

## 2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan serta pemberian dukungan administratif bidang perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Kecamatan dibantu oleh Subbagian Perencanaan dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian.

### a. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris kecamatan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantuan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan.

### b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantuan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian.:

## 3. Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pelaksana bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantuan, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan.

#### **4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan adalah unsur pelaksana bidang pemberdayaan masyarakat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat.

#### **5. Seksi Ketentraman dan Keterbitan Umum**

Seksi Ketentraman dan Keterbitan Umum adalah unsur pelaksana bidang ketentraman dan keterbitan umum yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Keterbitan Umum yang mempunyai mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan keterbitan umum. **MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis selama kurun waktu satu tahun. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kertanegara tahun 2025 ini adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

### **B. SISTEMATIKA PENULISAN**

**SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKJIP KECAMATAN :  
KATA PENGANTAR**

Daftar Isi

Daftar

Tabel/Gambar

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Gambaran Umum

1. Latar Belakang

2. Kondisi Umum Kecamatan

### 3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

- B. Maksud Dan Tujuan
- C. Sistematika Penulisan

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- D. Anggaran Tahun 2025

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah
  - 1. Upaya Tindak Lanjut Atas Strategi Peningkatan Kinerja
  - 2. Capaian Kinerja Perangkat Daerah
    - a. Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2025
    - b. Perbandingan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
    - c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis perangkat daerah
    - d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
    - e. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
    - f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja

- B. Realisasi Anggaran

## BAB IV PENUTUP

Lampiran

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 1. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Kinerja tahun 2025 disusun berdasarkan dokumen RPJMD periode tahun 2025 – 2029 yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2029 yang merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2029 Visi Kabupaten Purbalingga adalah :

”AKSELERASI PEMBANGUNAN KOLABORATIF UNTUK PURBALINGGA MANDIRIDAN SEJAHTERA”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas telah dirumuskan garis-garis besar kebijakan yang akan dilaksanakan dalam bentuk 4 (empat) misi sebagai berikut :

##### a. Misi 1 : Bangkitkan Ekonomi Rakyat

Untuk mampu membangkitkan ekonomi rakyat , implementasinya diwujudkan dengan peningkatan daya saing small scale enterprise pemberdayaan ekonomi local khususnya pada UMKM yang ada di Kabupaten Purbalingga. Dengan pemberdayaan ekonomi lokal diharapkan dapat mendorong pertumbuhan UMKM yang bergerak pada simpul-simpul perekonomian dalam industri pengolahan pengolahan,pertanian,perdagangan,jasa,pariwisata dan ekonomi kreatif. UMKM yang tumbuh bukan hanya UMKM eksisting saja namun juga menumbuhkan UMKM dan wirausaha baru dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif, kolaborasi investasi dan penciptaan lapangan kerja terutama di sektor jasa dan ekonomi kreatif.Upaya membangkitkan ekonomi rakyat juga diwujudkan dengan memperkuat daya saing komoditas unggulan daerah serta mendorong peningkatan produksi dan nilai tambah pada masing-masing komoditas tersebut.

Daya saing ekonomi lokal yang semakin tumbuh akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan per kapita riil masyarakat yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kemakmuran rakyat. Lebih jauh, pertumbuhan ekonomi juga akan menurunkan tingkat pengangguran karena adanya penyerapan jumlah angkatan kerja.

**b. Misi 2 : Akselerasi pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan**

Peningkatan daya saing infrastruktur implementasinya diwujudkan dengan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah dalam rangka memfasilitasi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Pengembangan potensi sektor-sektor unggulan daerah didukung dengan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita masyarakat serta menurunnya kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Purbalingga. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan tersebut juga dimaksudkan agar tercipta pembangunan yang berorientasi pada kesinambungan lingkungan. Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur juga didukung dengan proyek berbasis kemitraan publik-swasta melalui kolaborasi dengan seluruh stakeholders di tingkat nasional, provinsi maupun antar daerah.

**c. Misi 3 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik**

Reformasi birokrasi dan pelayanan publik dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik yang implementasinya diwujudkan dengan menerapkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tatakelola pemerintahan yang bersih dan transparan diwujudkan melalui dukungan aparatur pemerintahan yang memadai, tata manajemen pengelolaan pemerintahan yang efektif, struktur organisasi yang efisien, serta sikap dan perilaku RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029

III - 3 aparatur yang baik. Sedangkan responsif diwujudkan melalui pelibatan kontribusi serta kekuatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Pelayanan publik dan reformasi birokrasi tersebut juga harus berbasis inovasi dan teknologi yang mengikuti perkembangan zaman karena digitalisasi layanan publik akan mampu mempermudah efisiensi dan aksesibilitas pelayanan pemerintah bagi masyarakat. Reformasi birokrasi juga dapat berkontribusi pada

peningkatan kemandirian fiskal daerah karena dengan dukungan aparatur negara yang berkualitas dapat membantu daerah dalam mengelola keuangan daerah serta membantu daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

**d. Misi 4 : Unggulkan Kualitas SDM**

Untuk mewujudkan kualitas SDM yang unggul, implementasinya diwujudkan dengan peningkatan kualitas manusia yang diukur dari aspek-aspek lahiriah seperti tingkat pendidikan dan derajat kesehatan. Penguatan dalam aspek pendidikan akan membentuk karakter dan membangun keadaban serta etos kerja dan integritas SDM yang memadai. Disamping itu penguatan kesehatan juga dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas SDM, karena masyarakat yang sehat dapat bekerja, belajar, dan berinovasi dengan lebih baik.

Rincian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja kecamatan Kertanegara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kertanegara  
Tahun 2025

No	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Publik Di Kecamatan Kertanegara	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Kertanegara
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kertanegara	Nilai SAKIP Kecamatan Kertanegara

**2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang

disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Kertanegara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3  
PERJANJIAN KINERJA  
KECAMATAN KERTANEGARATAHUN 2025

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	94,10
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indeks	94,10
Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan		Nilai Kematangan Peringkat Daerah	Nilai	35
	Meningkatnya implementasi SAKIP kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	64,25

No	Program	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	23.550.000	12.493.800	53,05
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	35.000.000	25.933.000	74,09
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	47.000.000	45.400.000	96,59

4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.000.000	3.500.000	50,00
5	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	26.200.000	26.200.000	100
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.687.167.000	1.221.199.087	72,38

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 yang telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Purbalingga nomor : 000.8/110 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 maka Perangkat Daerah wajib menyesuaikan melalui Perjanjian Kinerja Perubahan. Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Kertanegara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4  
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
KECAMATAN KERTANEGARATAHUN 2025

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1) Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	(2)	(4) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	(5) Angka	(6) 94,10
	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan Kertanegara	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Kertanegara	Angka	3,00
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Kecamatan Kertanegara	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	64,25

No	Program	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	12.494.000	12.493.800	99,99
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	26.733.000	25.933.000	97,00
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	45.400.000	45.400.000	100
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.500.000	3.500.000	100
5	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	26.200.000	26.200.000	100
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.334.038.000	1.221.199.087	91,54

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Kecamatan Kertanegara melaksanakan pengukuran indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Kertanegara Tahun 2025.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

##### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2.	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3.	66 % ≤ 75 %	Sedang
4.	51 % ≤ 65 %	Rendah
5.	≤ 50 %	Sangat Rendah

### **3.1 Upaya Tindak Lanjut Atas Strategi Peningkatan Kinerja**

Strategi yang telah dilakukan pada tahun 2025 sebagai upaya untuk peningkatan kinerja pada tahun sebelumnya antara lain:

1. Dalam hal capaian tujuan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan dan Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan” dengan 15indicator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Kecamatan Kertanegara senantiasa melaksanakan perbaikan pelayanan secara terus menerus dengan cara pelaksanaan evaluasi atas Standar Pelayanan Publik yang diterapkan dengan menggunakan sarana Forum Konsultasi Publik secara berkala untuk menggali masukan dan saran atas pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Kertanegara. Dengan perbaikan Standar Pelayanan Publik tersebut menjadi instrumen formal untuk melakukan penyesuaian atas kelemahan yang masih terjadi sekaligus penguatan terhadap capaian yang sudah diraih dalam penilaian kepuasan masyarakat
2. Dalam hal perbaikan capaian sasaran yaitu “meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan” dengan indikator nilai SAKIP, pada tahun 2025 Kecamatan Kertanegara melakukan perbaikan dengan mendasari strategi yang sudah ditetapkan pada tahun sebelumnya. Secara bertahap kualitas dokumen SAKIP ditingkatkan mulai dari aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja internal. Serta yang tidak kalah penting secara bertahap melakukan peningkatan pemahaman kepada personil terhadap pentingnya implementasi SAKIP. Sehingga pada tahun ini, capaian nilai SAKIP mengalami peningkatan sebesar 1,10 poin sudah mencapai target perjanjian kinerja yang ditetapkan yaitu 64,25.

### 3.2 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja adalah untuk memperjelas apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan

Hasil pengukuran atas indikator kinerja Kecamatan Kertanegara Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2  
**Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025  
( Sebelum Perubahan )**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public di kecamatan		Indek kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	94,10	95,02	100,97
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Kecamatan	Indeks	94,10	95,02	100,97
	Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	35	33	94,28
		Meningkatnya implementasi SAKIP kecamatan RATA-RATA	Nilai SAKIP kecamatan	Angka	64,25	64,26	100,01
							98,42

Adapun setelah ditetapkannya Keputusan Bupati Purbalingga nomor : 000.8/110 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029, maka hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kertanegara adalah sebagai berikut:

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari target indicator kinerja sebesar 94,10 dapat direalisasikan sebesar 95,02 atau tercapai 100,97 %, hal ini menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat dengan kriteria Sangat Berhasil yaitu realisasi diatas 100 %.

**a. Perbandingan antara realisasi 2025 dengan capaian beberapa tahun sebelumnya dan dokumen perencanaan strategis Kecamatan Kertanegara tahun 2021-2025**

Tabel Target IKM Tahun 2025 dan beberapa Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Target Akhir
Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	86,62	87,86	93,69	94,10	95,02	100,97	90,00
Pesentase Pencapaian ( % )		100,72	100,98	106,46		100,97		

Realisasi kinerja tahun 2025 dan capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 95,02 lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Kertanegara Tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 94,10. Realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2025 memiliki tren naik dan turun tahun dimana realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 106,46, tahun 2023 sebesar 100,98, tahun 2022 sebesar 100,72 . Sedangkan capaian kinerja tahun 2025 sebesar 100,97 persen dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 90.

**Data dan Informasi Indeks Kepuasan Masyarakat**

Evaluasi pada tujuan strategis sebelum perubahan yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan” dan sasaran strategis sebelum perubahan yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan” dengan indikator yang sama yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat”. Pengukuran tersebut didapatkan dari Survei Kepuasan Masyarakat menggunakan metode survei online kepada pengguna layanan melalui aplikasi alpukat pada laman [skm.purbalinggakab.go.id](http://skm.purbalinggakab.go.id) yang dilakukan selama empat (4) kali dalam satu tahun. Adapun pelaksanaan survei

Tabel 3.3

Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public di kecamatan		Indek kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	94,10	95,02	100,97
		Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan Kertanegara	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Kertanegara	Angka	3,00	2,658	88,60
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kertanegara	Nilai SAKIP Kecamatan Kertanegara	Angka	64,25	64,26	100,01
		RATA-RATA					96,52

#### Analisis dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 tersebut adalah sebagai berikut

##### Tujuan 1 :

#### Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Hasil evaluasi pada tujuan strategis “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan” dan sasaran strategis ”Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan” dengan indikator yang sama yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat” mendapatkan nilai rata-rata 95,02 dengan kategori Sangat Tinggi Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan

Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian	Target Akhir
Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	94,10	95,02	100,97	94,60

kepuasan masyarakat periode I tahun 2025 dilaksanakan pada rentan waktu survey mulai tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 30 Maret 2025. Sedangkan survey pelaksanaan survei kepuasan masyarakat periode II tahun 2025 dilaksanakan pada rentan waktu survei mulai tanggal 1 April 2025 sampai dengan 30 Juni 2025. Periode ke III dimulai dari 1 Juli 2025 sampai 31 September 2025, sedangkan periode IV dimulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 31 Desember 2025. Dari hasil evaluasi tujuan strategis dan sasaran strategis sebelum perubahan didapatkan realisasi kinerja tahun 2025 mendapatkan nilai rata-rata 95,10 atau 101,06 persen dari target sebelum perubahan yang ditetapkan sebesar 94,10 dengan kategori sangat tinggi. Sedangkan hasil Survey kepuasan Masyarakat setelah Perubahan adalah 95,02 atau 100,97 persen

Berdasarkan hasil pengolahan terhadap kuesioner tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah responden : 355 responden
- b. Nilai IKM : **95,02**
- c. Kategorisasi Mutu : Pembuatan KTP/KK dan Pelayanan Legalisasi dll

Dengan kategori **Sangat Baik**

Berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017, untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan cara membagi total nilai persepsi per unsur dengan total unsur yang terisi, kemudian dikalikan dengan nilai penimbang. Untuk mempermudah interpretasi terhadap penilaian SKM yakni antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversi dengan nilai dasar 25. Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh nilai unsur pelayanan sebagai berikut.

Tabel 3.5 Kategori Mutu Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik

3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Untuk melihat bagaimana kualitas layanan pada unsur pelayanan dilakukan dengan analisis statistik deskriptif. Jawaban responden dikategorikan menjadi empat kategori yakni tidak baik, kurang baik, baik, dan sangat baik. Melalui analisis ini dapat diketahui kecenderungan jawaban responden terkait mutu pelayanan disetiap unsur.

Berikut ini kategori unsur layanan pada unit layanan Kecamatan Kertanegara.

Tabel 3.6

SKM Unit Layanan Kecamatan Kertanegara

No	Unsur Layanan	SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Layanan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persyaratan	94,80	A	Sangat Baik
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	95,57	A	Sangat Baik
3	Waktu Penyelesaian	95,77	A	Sangat Baik
4	Biaya/tarif	100	A	Sangat Baik
5	Produk spesifikasi Jenis Layanan	94,65	A	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	95,97	A	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	95,42	A	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	96,62	A	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	95,27	A	Sangat Baik
<b>UNIT LAYANAN</b>		<b>95,02</b>	<b>A</b>	<b>Sangat Baik</b>

Sumber: data primer diolah 2025.

Berdasarkan tabel SKM di atas dapat diketahui bahwa nilai Kecamatan Kertanegara Tahun 2025 memperoleh nilai Sangat Baik (A) dengan angka 95,02. Dari seluruh unsur

pelayanan yang ada, nilai tertinggi terdapat beberapa unsur Biaya/Tarif dengan nilai 100. sedangkan nilai terendah terdapat pada unsur Produk spesifikasi jenis layanan (94,65).

Dari data Tabel tersebut diatas dapat di analisa sebagai berikut ;

#### **Analisis Unsur Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat**

Pelayanan Prima dengan “ Jargon “ Melayani Dengan Sepenuh Hati yang menjadikan Kecamatan Kertanegara terus berupaya sebaik mungkin meningkatkan kualitas pelayanan dengan membenahi berbagai sisi pelayanan demi terciptanya kualitas pelayanan yang baik dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna jasa layanan.

#### **1. Persyaratan**

Tabel 3.7 Unsur Persyaratan

No	Unsur Layanan	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persyaratan	-	-	74	282	355
		-	-	20,84%	79,16%	100%

Berdasarkan hasil jawaban responden diperoleh data hasil penelitian yang berkaitan dengan indikator persyaratan pelayanan bahwa masyarakat memberikan persepsi baik. Dari 355 responden yang mengisi di aplikasi alpukat untuk 282 responden mengisi kategori sangat baik Hal ini menunjukkan bahwan persyaratan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.

#### **2. Sistem ,Mekanisme dan Prosedur**

Tabel 3.8 Unsur Sistem ,Mekanisme dan Prosedur

No	Unsur Layanan	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sistem ,Mekanisme dan Prosedur	-	-	63	292	355
		-	-	17,75%	82,25%	100%

Berdasarkan data hasil penelitian dan setelah dilakukan tabulasi data maka diperoleh kenyataan bahwa persepsi responden menyatakan kondisi pelayanan di Kecamatan Kertanegara yang berhubungan dengan unsur prosedur pelayanan

tersebut diatas sudah baik .Dari 355 responden hamper separuhnya memberikan respon yang baik terhadap unsur sitem, mekanisme dan prosedur Hal ini dikarenakan adanya informasi yang jelas dari pihak Kecamatan baik berupa papan pengumuman ,sosialisasi lewat desa maupun informasi yang lain yang mudah diakses oleh masyarakat pengguna layanan ini. Masyarakat merasa sangat terbantu sekali dengan apa yang telah dilakukan oleh kecamatan terutama dalam hal sosialisasi mengenai prosedur dan tata cara memperoleh layanan Pembuatan KTP/KK, sehingga sangat jelas bagi mereka tentang apa yang harus disertakan dan dipersiapkan.

Dengan melihat tingkat persepsi masyarakat ini menandakan bahwa masyarakat sangat menginginkan adanya kejelasan informasi dan prosedur pelayanan yang terbuka guna memperoleh layanan KTP/KK dan Legalisasi surat-surat lainnya, Prosedur yang jelas dan mudah dimengerti merupakan harapan masyarakat untuk memperoleh Pelayanan

### 3. Waktu Pelayanan

Tabel 3.9 Unsur Waktu Pelayanan

No	Unsur Layanan	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Waktu Pelayanan	-		60	295	355
		-		16,90%	83,10%	100%

Hasil survey bahwa responden memberikan persepsi terhadap unsur layanan Waktu pelayaan adalah baik. Hamper seluruh responden memberikan nilai baik pada unsur waktu pelayanan dengan angka 83,10% dengan katagori sangat baik.Hal ini bisa disebabkan karena di Kecamatan Kertanegara sudah ada pegawai yang khusus menangani baik urusan KTP/KK maupun Legalisasi surat-surat lainnya. Sehingga masyarakat datang bisa langsung dilayani dengan cepat.

#### 4. Biaya/tarif

Tabel 3.10 Unsur Biaya/tarif

No	Unsur Layanan	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Biaya/tarif	-	-		355	355
		-	-		100%	100%

Dengan berlakunya UU No 24 Tahun 2013 Pasal 79 A Bahwa Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan (KK, KTP e, Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, Akte Kematian, Akte Perceraian, Akte Pengakuan hak dan lain lain) tidak dipungut biaya/gratis.untuk unsur Biaya/tarif dengan kategori baik.Dengan berlakunya Undang- undang tersebut maka masyarakat yang datang meminta pelayanan bisa langsung dilayani tanpa harus membayar/gratis.

#### 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Tabel 3.11 Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

No	Unsur Layanan	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	-	-	76	279	355
		-	-	21,40%	78,60%	100%

Responden menyatakan bahwa Jneis pelayanan yang dihasilkan sudah sesuai dengan Standar pelayanan, hal ini dapat di tunjukan dengn prosentase responden yang memilih sangat baik sebesar 78,60%

#### 6. Kompetensi Pelaksana

Tabel 3.12 Unsur Kompetensi Pelaksana

No	Unsur Layanan	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kompetensi Pelaksana	-	-	57	298	355
		-	-	16,05%	83,95%	100%

Responden memberikan persepsi sangat baik terhadap Indikator Kompetensi Pelaksana pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemampuan teknis komputerisasi memang sudah tidak diragukan lagi karena SDM yang ada merupakan tenaga yang terlatih dalam bidangnya dan juga berpengalaman dalam hal pelayanan pembuatan KTP, KK, surat pindah antar kecamatan dan antar Kabupaten.

## 7. Perilaku Pelaksana

Tabel 3.13 Unsur Perilaku Pelaksana

No	Unsur Layanan	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Perilaku Pelaksana	-	-	65	290	355
		-	-	18,30%	81,70%	100%

Indikator Perilaku Pelaksana merupakan tingkat kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kesopanan dan keramahan petugas adalah bentuk penghargaan mereka terhadap masyarakat selaku pengguna jasa. Hal semacam ini sangat dirasakan sekali oleh masyarakat, bila mereka dilayani dengan baik dan sopan serta menghargai masyarakat maka tingkat kepuasan masyarakat di kecamatan tentunya akan meningkat. Berdasarkan hasil pengolahan data memperlihatkan bahwa responden memberikan persepsi penilaian **baik** terhadap indikator Perilaku Pelaksana dan keramahan petugas. Menurut masyarakat petugas dalam memberikan pelayanan disertai dengan sikap yang ramah, sopan serta menghargai keadaan masyarakat yang memerlukan pelayanan.

## 8. Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan

Tabel 3.14 Unsur Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan

No	Unsur Layanan	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penanganan Pengaduan,	-		48	307	355

Sarana dan Masukan	-	13,52%	86,48%	100%
--------------------	---	--------	--------	------

Dapat diambil kesimpulan bahwa Pengaduan dari masyarakat sudah dikelola dengan baik mengenai pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan.

### 9. Sarana dan Prasarana

Tabel 3.15 Unsur Sarana dan Prasarana

No	Unsur Layanan	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sarana dan Prasarana	-		67	288	355
		-		18,87%	81,13%	100%

Dapat diambil kesimpulan bahwa sarana dan prasarana yang ada sudah memberikan kenyamanan bagi masyarakat hal ini dapat diketahui dari sebanyak 288 responden memberikan nilai dengan kategori sangat baik

Selanjutnya dari hasil SKM tersebut beberapa hal yang menjadi rekomendasi dalam perbaikan adalah :

Tabel 3.9

Rekomendasi atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025

No	Prioritas Unsur	Program/ Kegiatan	Waktu			Penanggung Jawab
			Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang	
1.	Persyaratan	Deregulasi Persyaratan Pelayanan	-	Evaluasi dan penyederhanaan persyaratan pelayanan	Digitalisasi persyaratan layanan	Pemtramtibus
2.	Prosedur	-	-	-	-	-
3.	Waktu Pelayanan	Peningkatan kapasitas pelayanan pada jam sibuk (rush hour)	Pemetaan kebutuhan Sumber Daya	Implementasi Peningkatan kapasitas pelayanan pada jam sibuk (rush hour)	-	Unit/ Seksi pemtramtibus

No	Prioritas Unsur	Program/ Kegiatan	Waktu			Penang gung Jawab
			Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang	
4.	Biaya/ Tarif	-	-	-	-	-
5.	Produk layanan	Inovasi dalam peningkatan quality control	Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap proses kerja (business process)	Penambahan fungsi quality control dalam menjamin produk pelayanan	-	Unit/ Seksi pemtra mtibum
6.	Kompetensi Pelaksana	Peningkatan kompetensi pelaksana	Evaluasi kompetensi pelaksana	Diklat atau seminar peningkatan kompetensi pelaksana	Membang un kompetensi Teknologi informasi	Unit/ Seksi PMD
7.	Perilaku Pelaksana	Peningkatan pelayanan prima	Evaluasi pelayanan prima	Diklat pelayanan prima	-	Unit/ Seksi pemtra mtibum
8.	Sarana & Prasarana	Penambahan fasilitas pendukung sesuai kebutuhan	Pemetaan kebutuhan penambahan fasilitas pendukung layanan	Pemenuhan kebutuhan penambahan fasilitas pendukung layanan	-	Unit/ Seksi Pemtra mtibum
9.	Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan	Optimalisasi fungsi pengaduan masyarakat	Sosialisasi Penanganan Pengaduan berbasis internet	Menyiapkan sarana & prasarana penanganan pengaduan berbasis internet	Penyeleng garaan penanganan pengadua n berbasis internet	Unit/ Seksi Pemtra mtibum

Analisis keberhasilan capaian indikator, sebutkan

Pencapaian nilai indeks kepuasan masyarakat tersebut tidak luput dari beberapa factor keberhasilan , diantaranya adalah :

1. Konsistensi penerapan standar pelayanan sehingga proses pelayanan menjadi lebih jelas, terukur dan seragam
2. Peningkatan disiplin dan profesionalisme petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan yang responsive dan ramah kepada masyarakat
3. Komitmen pimpinan dan aparat yang tercerminkan meningkatkan kualitas pelayanan public.

Dari beberapa program yang telah dilaksanakan dalam mencapai target kinerja sasaran diatas terdapat hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala dalam pencapaian Sasaran Strategis diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman para pelaksana pelayanan tentang pelayanan prima
2. Keterbatasan Anggaran untuk peningkatan sarana prasarana pelayanan.
3. Belum tersedianya blanko KTP secara memadai

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Meningkatkan komitmen dan kedisiplinan semua pelaksana pelayanan dengan mengacu pada maklumat pelayanan yang telah ditetapkan
2. Komitmen dari Pemkab Purbalingga terhadap kualitas pelayanan public hendaknya disertai dengan anggaran yang mencukupidalam hal pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan kantor
3. Berkoordinasi dengan Dinas terkait, jika ada masyarakat yang membutuhkan KTP untuk langsung mencetak di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga.

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  - a. Kegiatan koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
  - a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - a. Kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
  - a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - a. Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dari beberapa program yang telah dilaksanakan dalam mencapai target kinerja sasaran diatas terdapat hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala dalam pencapaian Sasaran Strategis diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman para pelaksana pelayanan tentang pelayanan prima
2. Keterbatasan Anggaran untuk peningkatan sarana prasarana pelayanan.
3. Belum tersedianya blanko KTP secara memadai

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Meningkatkan komitmen dan kedisiplinan semua pelaksana pelayanan dengan mengacu pada maklumat pelayanan yang telah ditetapkan
2. Komitmen dari Pemkab Purbalingga terhadap kualitas pelayanan public hendaknya disertai dengan anggaran yang mencukupidalam hal pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan kantor
3. Berkoordinasi dengan Dinas terkait, jika ada masyarakat yang membutuhkan KTP untuk langsung mencetak di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga.

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  - a. Kegiatan koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
  - a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - a. Kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
  - a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - a. Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

**Tujuan 2**

**Meningkatnya kualitas kelembagaan Kecamatan**

**a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini**

Hasil evaluasi pada tujuan strategis “Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan” mendapatkan capaian kinerja sebesar 94,28 persen dengan kategori sedang. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

**Tabel 15**  
**Capaian Kinerja Tujuan “Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan”**

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Kategori
Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	35	33	94,28	Sedang

Berdasarkan tabel diatas, hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja tujuan yaitu “Meningkatnya kualitas Kelembagaan Kecamatan” dengan indikator kinerja Nilai Indeks Kematangan Perangkat Daerah mendapatkan hasil sebesar 33 dari target 35 atau capaian sebesar 94,28 persen dengan predikat “Sedang” .

**b. Perbandingan antara realisasi 2025 dengan capaian beberapa tahun sebelumnya dan Dokumen Perencanaan Strategis Kecamatan Kertanegara Tahun 2021-2026**

**Tabel 16**

**Perbandingan antara realisasi 2025 dengan capaian beberapa tahun sebelumnya dan Dokumen Perencanaan Strategis Kecamatan Kertanegara Tahun 2021-2026**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Target Akhir Renstra 2021-2026
Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	NA	NA	29	32	35	33	94,28	36
<b>Rata – rata Capaian Kinerja</b>									
								94,28	

Berdasarkan tabel diatas, realisasi capaian kinerja tujuan dengan indikator Nilai Kematangan Perangkat Daerah mendapatkan nilai sebesar 33 atau 94,28

persen rendah dibandingkan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Kertanegara Tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 35. Capaian ini menunjukkan belum adanya peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya yaitu 29 pada tahun 2023 dan 32 pada tahun 2024. Dibandingkan capaian kinerja tahun 2024, realisasi kinerja tahun 2025 mengalami kenaikan.

#### **Data dan Informasi terkait Kematangan Perangkat Daerah**

Tujuan Strategis kedua sebelum perubahan yaitu "Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan" dengan indikator "Nilai Kematangan Perangkat Daerah". Pengukuran indikator Nilai Kematangan Perangkat Daerah didapatkan melalui penilaian dokumen kematangan perangkat daerah meliputi 11 komponen kematangan perangkat daerah pada tahun 2025.

Hasil pengukuran masing-masing komponen kematangan perangkat daerah Kecamatan Kertanegara tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 17**

**Nilai Kematangan Perangkat Daerah Kecamatan Kertanegara Tahun 2025**

NO	KOMPONEN	NILAI 2025	KETERANGAN
1	Perencanaan Pembangunan Daerah	5	
2	Monitoring dan pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah	5	
3	Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah	3	
4	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah	3	
5	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	1	
6	Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah	3	
7	Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja yang Terukur	2	
8	Manajemen Risiko Pelaksanaan Tugas Aparatur	1	
9	Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur	5	
10	Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah	2	
11	Budaya Organisasi Perangkat Daerah	3	

Berdasarkan tabel rincian nilai kematangan perangkat daerah diatas, dapat ditarik informasi untuk setiap komponen sebagai berikut:

1. Komponen Perencanaan Pembangunan Daerah mendapatkan nilai maksimal yaitu 5 menunjukkan dari komponen perencanaan pembangunan daerah untuk Kecamatan Kertanegara sudah dinyatakan matang dengan bukti dukung dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara lengkap.
2. Komponen Monitoring dan pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah mendapatkan nilai 5 menunjukkan komponen monitoring pengendalian pelaksanaan tugas perangkat daerah cukup matang. Masih diperlukan peningkatan terhadap monitoring dan pengendalian pelaksanaan tugas perangkat daerah melalui penjadwalan monitoring secara berkala, menetapkan standar kriteria monitoring, menetapkan rencana tindak lanjut atas rekomendasi hasil monitoring dan pengendalian pelaksanaan tugas perangkat daerah.
3. Komponen Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah mendapatkan nilai 3 menunjukkan komponen penjaminan mutu layanan perangkat daerah belum matang. Kedepan diperlukan penjaminan mutu secara berkala dilakukan oleh pihak eksternal berstandar dengan pengujian tenaga ahli bersertifikat.
4. Komponen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah mendapatkan nilai 3, menunjukkan komponen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah cukup matang dengan pelaksanaan penyusunan SOP sesuai dengan alur dan melibatkan *stakeholders*. Saat ini baru pada tahap proses pelaksanaan pekerjaan dituangkan dalam SOP. Langkah tindak lanjut untuk meningkatkan kematangan pada komponen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah dengan cara melakukan evaluasi terhadap SOP, revisi atas SOP yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi serta memasukkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian layanan.

Komponen Pendidikan dan Pelatihan Aparatur mendapatkan nilai 1 menunjukkan komponen penjaminan mutu layanan perangkat daerah belum matang. Kedepan diperlukan rencana kebutuhan pengembangan

5. kompetensi bagi aparatur secara komprehensif untuk semua jabatan, evaluasi reguler dan penyusunan rekomendasi dan tindaklanjut.
6. Komponen Analisis Kebijakan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah mendapatkan nilai 3 menunjukkan komponen analisis Kebijakan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah belum cukup matang.
7. Komponen Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja yang terukur mendapatkan nilai 2, menunjukkan komponen Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja yang belum terukur kedepan akan dilakukan evaluasi dan langkah langkah yang akan dilakukan.
8. Komponen Manajemen Risiko Pelaksanaan Tugas Aparatur mendapatkan nilai 1 karena belum telah disusunnya manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas aparatur. Langkah penyempurnaan yang perlu terus dilakukan adalah dengan penyusunan dan penerapan rencana tindak pengendalian terhadap semua risiko kegiatan serta pelaksanaan evaluasi secara berkala.
9. Komponen Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur mendapatkan nilai 5, menunjukkan komponen Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur sudah matang. Sebagai langkah penyempurnaan terhadap Komponen Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur diperlukan pengukutan tingkat capaian kinerja dengan memanfaatkan aplikasi teknologi informasi.
10. Komponen Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah mendapatkan nilai 2 menunjukkan komponen Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur belum sudah matang karena belum dilakukan pengembangan secara komprehensif dan berkelanjutan. Kedepan diperlukan pengajuan inovasi kedalam kreasi inovasi tingkat regional serta perlu dilakukan kajian dan pengembangan inovasi yang

berkelanjutan.

11. Komponen Budaya Organisasi Perangkat Daerah mendapatkan nilai 3 menunjukkan komponen Budaya Organisasi Perangkat Daerah belum cukup matang. Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kertanegara sudah menerapkan praktek budaya organisasi namun sifatnya masih belum spesifik. Diperlukan langkah perbaikan berupa dokumentasi nilai, sikap dan perilaku budaya disertai penerapan internalisasi budaya organisasi yang berkelanjutan serta pelaksanaan evaluasi rutin atas budaya organisasi yang diterapkan.

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Keberhasilan pencapaian nilai kematangan yang tinggi pada beberapa komponen dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

1. Tersedianya Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan yang jelas dan terdokumentasi dengan baik yang menjadi pedoman aparatur dalam memberikan pelayanan secara konsisten;
2. Standar Pelayanan Publik (SOP) dievaluasi secara berkala melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan melibatkan pengguna layanan dan *stakeholder* pelayanan publik Kecamatan Bukateja;
3. Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang sistematis dan selaras dengan RPJMD, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah, serta didukung koordinasi lintas sektor dan berbasis kebutuhan masyarakat.
4. Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah. Pencapaian nilai tinggi didukung oleh pelaksanaan monitoring, pelaporan berkala, dan evaluasi kinerja yang berjalan secara efektif.

**Hambatan/ Kendala dalam pencapaian kinerja Nilai Kematangan Perangkat Daerah sebagai berikut:**

1. Minimnya Sarana Prasarana yang dimiliki Kecamatan Kertanegara, seperti belum tersedianya toilet khusus pengguna layanan, ruang laktasi yang memadai dan ruang khusus merokok.

2. Belum semua pelaksana pelayanan mendapatkan pembekalan mengenai *service excellence/* pelayanan prima sehingga pelayanan yang diselenggarakan masih belum optimal.
3. Adanya rangkap jabatan dikarenakan terbatasnya aparatur di Kecamatan Kertanegara yang menjadikan tidak optimalnya.

**Upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan Nilai Kematangan Perangkat Daerah antara lain:**

1. Terhadap SOP yang telah ditetapkan, senantiasa dilakukan evaluasi secara berkala melalui Forum Konsultasi Publik untuk mendapatkan saran dan masukan terhadap penerapan SOP. Sebagai langkah tindak lanjut atas evaluasi atas SOP tersebut kemudian perlu dilakukan revisi atas SOP yang telah ditetapkan.
2. Kecamatan Kertanegara perlu segera menyusun Manajemen Risiko atas Pelaksanaan Tugas Aparatur dan mengikutsertakan aparatur pada bimbingan teknis maupun pelatihan terkait manajemen risiko untuk meningkatkan pemahaman aparatur terhadap manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas aparatur.
3. Diperlukannya pengembangan inovasi secara berkesinambungan melalui replikasi atau duplikasi terhadap inovasi yang sudah ada.
4. Kecamatan Kertanegara perlu menetapkan budaya organisasi melalui Keputusan Camat. Selanjutnya atas Budaya Organisasi yang ditetapkan dilakukan sosialisasi kepada aparatur yang ada untuk menjamin nilai-nilai budaya organisasi dapat diterapkan dan diinternalisasikan oleh masing-masing aparatur.

**d. Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Program yang menunjang capaian kinerja tujuan “Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan” yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**, sedangkan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu:

- i. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- ii. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- iii. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- iv. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- v. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
- vi. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

vii. Pengadaan Barang Milik Daerah.

**SASARAN 2**  
**MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN KERTANEGARA**  
**dengan indikator Nilai SAKIP Kecamatan Kertanegara**

Capaian Kinerja Implementasi Nilai SAKIP Kecamatan capaian nilai SAKIP pada tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.16

Capaian Kinerja Sasaran Implementasi Nilai SAKIP Kecamatan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian	Target Akhir
Implementasi Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	64,25	64,26	100,01	70,00

Berdasarkan Tabel di atas--dapat diketahui bahwa nilai SAKIP Kecamatan Kertanegara pada Tahun 2025 yaitu 64,26 dari target 64,25 atau tercapai 100,01 %

Nilai Masing – masing indicator dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.17

Capaian Kinerja Sasaran Implementasi Nilai SAKIP perkomponen Tahun 2025

No	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Perencanaan Kinerja	30,00	4,20	6,30	10,50	<b>21,00</b>
2	Pengukuran Kinerja	30,00	4,20	5,40	9,00	<b>18,00</b>
3	Pelaporan Kinerja	15,00	2,10	2,70	4,50	<b>9,75</b>
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	3,50	4,50	6,25	<b>15,50</b>
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>100,00</b>	<b>14,60</b>	<b>18,45</b>	<b>29,50</b>	<b>64,26</b>

Berdasarkan tabel diatas Kecamatan Kertanegara memperoleh nilai 64,26 dengan kategori **B ( Baik )**.Penilaian tersebut menggambarkan bahwa AKIP Kecamatan Kertanegara baik, namun demikian masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.

Adapun perbandingan nilai SAKIP tahun 2025 dengan beberapa tahun yang lalu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.20

Perbandingan Nilai SAKIP Kecamatan Tahun 2025 dengan beberapa tahun yang lalu

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Target Akhir
Nilai SAKIP	Angka	55,51	61,06	63,16	64,25	64,26	100,01	70

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai SAKIP semakin tahun semakin membaik,Kecamatan Kertanegara terus berupaya dari tahun ke tahun untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.

Adapun hasil evaluasi dapat diuraikan sebagai berikut :

#### A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

1. Masih ada Pegawai yang belum menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2025 dan Perjanjian Kinerja (PK) 2025;
2. Dokumen Ranwal Renja 2026 belum disusun
3. Terdapat beberapa indikator kinerja program dan kegiatan yang ditetapkan pada dokumen perencanaan kinerja yakni pada Rencana Kerja 2025 belum memenuhi kriteria SMART, sebagai contoh tersedianya bahan logistik kantor yang disediakan
4. Dalam Perencanaan Kinerja masih terdapat target yang belum didasarkan pada capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu pada indikator Nilai Kematangan Perangkat daerah dan Nilai Sakip Kecamatan
5. Sebagian Besar Dokumen Perencanaan Kinerja belum di unggah pada website kecamatan
6. Rencana aksi kinerja tidak berjalan dinamis karena capaian kinerja belum dipantau secara berkala dan belum dijadikan dasar pencapaian kinerja periode berikutnya;
7. Penyusunan Pohon Kinerja belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 karena belum sesuai dengan prinsip-prinsip teknis pada saat penyusunan pohon kinerja yaitu : 1) Sudah dihubungkan dengan dokumen perencanaan; 2) Belum terlihat adanya identifikasi cross-cutting kinerja

#### B. Evaluasi Atas Pengukuran Kinerja

1. Pengukuran kinerja belum menjadi strategi mencapai kinerja, belum mempengaruhi kebijakan pimpinan, serta belum mempengaruhi penyelesaian aktivitas mencapai target kinerja dilihat dari dokumen notulen dan daftar hadir rapat monitoring dan evaluasi kinerja per triwulan

2. Informasi dan Notulensi terkait rencana aksi kinerja belum mendasarkan pada kinerja yang sebenarnya, analisa yang disajikan kurang mendalam di mana tidak membahas secara detail capaian dari rencana aksi yang dibuat dan tidak memberikan evaluasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya

3. Aplikasi Pengukuran Kinerja e-sakip.purbalinggakab.go.id belum dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja, terutama dalam monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja Organisasi;

4. Masih ada Pegawai yang belum mengisi e-kinerja secara konsisten;

5. Sebagian besar hasil pengukuran capaian kinerja pegawai pada E-kinerja belum diverifikasi oleh atasan secara konsisten

6. Aplikasi e-kinerja dan presensi belum dimanfaatkan sepenuhnya dalam pemberian penghargaan dan hukuman terutama dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai

#### C. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

1. Analisa efisiensi anggaran belum sepenuhnya disertai penjelasan mendalam bentuk konkrit upaya efisiensi yang dilakukan dalam mencapai kinerja
2. Belum ada kegiatan sosialisasi/rapat tentang penyusunan capaian kinerja dan evaluasi LKJIP tahun sebelumnya sehingga informasi yang terdapat pada LKJIP tidak menunjukkan pelaporan kinerja kecamatan dan hanya menjadi perhatian bagi sebagian pegawai
3. Laporan Kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi tahun berikutnya;
4. Penutup (Bab IV) dalam Laporan Kinerja (LKJIP) belum menyampaikan analisa Keberhasilan/Kegagalan, Solusi, Rekomendasi ke depan atas kinerja yang dilaksanakan

#### D. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja internal

1. Laporan Kinerja Tahun 2024 belum membahas upaya-upaya tindaklanjut atas rekomendasi Laporan Kinerja sebelumnya
2. Masih terdapat rekomendasi tahun lalu yang belum dijadikan bahan perbaikan yang dijalankan secara konsisten sehingga terjadi rekomendasi berulang pada Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

Keberhasilan capain nilai SAKIP tidak terlepas dari

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh ASN Kecamatan Kertanegara dalam implementasi SAKIP di Kecamatan Kertanegara
2. Adanya Koordinasi dan komunikasi intensif antara Kecamatan Kertanegara dengan OPD terkait dalam pelaksanaan implementasi SAKIP di Kecamatan Kertanegara

Adapun permasalahan yang ditemukan dalam penilaian SAKIP sebagai berikut :

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana terutama Teknologi Informasi
2. Masih kurangnya pemahaman pegawai mengenai pentingnya SAKIP bagi OPD Kecamatan Kertanegara
3. Masih kurangnya pembagian tugas dalam menyusun dokumen – dokumen yang dibutuhkan dalam SAKIP sehingga masih terfokus pada satu bagian, sehingga dokumen yang dihasilkan kurang maksimal

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah.

#### Tujuan 1 :

#### Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Hasil evaluasi pada tujuan strategis “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan” dan sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan” dengan indikator yang sama yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat” mendapatkan nilai rata-rata 95,02 dengan kategori Sangat Tinggi Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan

Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian	Target Akhir
Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	94,10	95,02	100,97	94,60

Dari hasil evaluasi tujuan strategis dan sasaran strategis sebelum perubahan didapatkan realisasi kinerja tahun 2025 mendapatkan nilai rata-rata 95,10 atau 101,06 persen dari target sebelum perubahan yang ditetapkan sebesar 94,10 dengan kategori sangat tinggi. Sedangkan hasil Survey kepuasan Masyarakat setelah Perubahan adalah 95,02 atau 100,97 persen

Berdasarkan hasil pengolahan terhadap kuisioner tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah responden : 355 responden
- b. Nilai IKM : **95,02**
- c. Kategorisasi Mutu Pelayanan : Pembuatan KTP/KK dan Pelayanan Legalisasi dll

Dengan kategori **Sangat Baik**

Berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017, untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan cara membagi total nilai persepsi per unsur dengan total unsur yang terisi, kemudian dikalikan dengan nilai penimbang. Untuk mempermudah interpretasi terhadap penilaian SKM yakni antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversi dengan nilai dasar 25. Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh nilai unsur pelayanan sebagai berikut.

Tabel 3.5  
Kategori Mutu Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

Untuk melihat bagaimana kualitas layanan pada unsur pelayanan dilakukan dengan analisis statistik deskriptif. Jawaban responden dikategorikan menjadi empat kategori yakni tidak baik, kurang baik, baik, dan sangat baik. Melalui analisis ini dapat diketahui kecenderungan jawaban responden terkait mutu pelayanan disetiap unsur. Berikut ini kategori unsur

layanan pada unit layanan Kecamatan Kertanegara.

Tabel 3.6

SKM Unit Layanan Kecamatan Kertanegara

No	Unsur Layanan	SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Layanan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persyaratan	94,80	A	Sangat Baik
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	95,57	A	Sangat Baik
3	Waktu Penyelesaian	95,77	A	Sangat Baik
4	Biaya/tarif	100	A	Sangat Baik
5	Produk spesifikasi Jenis Layanan	94,65	A	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	95,97	A	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	95,42	A	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	96,62	A	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	95,27	A	Sangat Baik
<b>UNIT LAYANAN</b>		<b>95,02</b>	<b>A</b>	<b>Sangat Baik</b>

Sumber: data primer diolah 2025.

Berdasarkan tabel SKM di atas dapat diketahui bahwa nilai Kecamatan Kertanegara Tahun 2025 memperoleh nilai Sangat Baik (A) dengan angka 95,02. Dari seluruh unsur pelayanan yang ada, nilai tertinggi terdapat beberapa unsur Biaya/Tarif dengan nilai 100. sedangkan nilai terendah terdapat pada unsur Produk spesifikasi jenis layanan (94,65).

Dari data Tabel tersebut diatas dapat di analisa sebagai berikut ;

#### **Analisis Unsur Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat**

Pelayanan Prima dengan “ Jargon “ Melayani Dengan Sepenuh Hati yang menjadikan Kecamatan Kertanegara terus berupaya sebaik mungkin meningkatkan kualitas pelayanan dengan membenahi berbagai sisi pelayanan demi terciptanya kualitas pelayanan yang baik dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna jasa layanan.

**SASARAN I**  
**MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN**

**a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini**

Tabel 28

Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan”

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Kategori
Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Angka	3,00	2,67	88,60	sedang

Berdasarkan tabel diatas, Hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja tujuan yaitu “Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan” dengan indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Kertanegara mendapatkan hasil sebesar 2,67 dari taget 3,00 atau capaian sebesar 88,60 persen dengan predikat “Sedang”.

**b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja 2025 dengan Capaian Kinerja beberapa Tahun Sebelumnya dan Dokumen Perencanaan Strategis Kecamatan Bukateja Tahun 2025 – 2029**

Tabel 29

Perbandingan antara realisasi 2025 dengan capaian beberapa tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Target Akhir Renstra 2025-2029
Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Bukateja	Angka	NA	NA	NA	NA	3,00	2,67	88,60	3,50
<b>Rata – rata Capaian Kinerja</b>									88,60

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja tahun 2025 dan capaian kinerja sasaran strategis dengan indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) mendapatkan hasil 2,67 atau 88,60 persen lebih rendah dari target yang ditetapkan pada Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Kertanegara

Tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 3,00. Hasil capaian pengukuran Indikator Indeks Pelayanan Publik Kecamatan untuk tahun 2025 baru dilaksanakan pada tahun 2025, sehingga realisasi kinerja tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya.

#### **Data dan Informasi terkait Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Kertanegara**

Instrumen penilaian PEKPPP didasarkan pada Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme PEKPPP. Mekanisme yang digunakan dalam penilaian yakni penilaian mandiri dan penilaian dari evaluator.

Terdapat 3 (tiga) Formulir yang digunakan dalam penilaian yakni :

1. F01: mekanisme input dengan menunggah bukti dukung dari jawaban pertanyaan, diisi oleh ULE;
2. F02 : Hasil penilaian evaluator dengan bobot 75 persen;
3. F03 : Hasil penilaian masyarakat dengan bobot 25 persen.

Penilaian PEKPPP terdiri atas 6 (enam) aspek penilaian dengan bobot masing-masing sebagai berikut:

1. Kebijakan Pelayanan (bobot 24 persen): meliputi Standar Pelayanan, Forum Konsultasi Publik, Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
2. Profesionalisme SDM (bobot 25 persen): kebijakan yang memudahkan pelayanan, kode etik dan budaya layanan, motivasi kerja, pemberian penghargaan dann budaya pelayanan;
3. Sarana dan Prasarana (bobot 18 persen): fasilitas parkir, ruang tunggu, sarana prasarana kelompok rentan, sarana prasarana penunjang, Front Office;
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (bobot 11 persen): sistem informasi, SIPP pendukung, kualitas SIPP;

5. Konsultasi dan Pengaduan (bobot 10 persen): sarana prasarana konsultasi pengaduan, substansi konsultasi dan pengaduan;

6. Inovasi (bobot 12 persen): penciptaan inovasi dan sumberdaya yang mendukung keberlanjutan inovasi.

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Beberapa faktor penyebab keberhasilan perolehan kinerja Indeks Pelayanan Publik ini antara lain:

1. Komitmen pimpinan dan aparaturnya Kecamatan Kertanegara dalam menerapkan pelayanan sesuai ketentuan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
2. Adanya evaluasi berkala terhadap kinerja pelayanan.
3. Kecakapan petugas memberikan pelayanan dan menjaga kedisiplinan petugas pelayanan.
4. Transparansi informasi pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan yang berpotensi mempengaruhi kualitas pelayanan, seperti:

1. Sarana dan prasarana yang memerlukan penambahan dan pembaharuan;
2. Ketergantungan waktu yang diperlukan terhadap proses pelayanan yang dilaksanakan oleh pihak lain;
3. Tantangan adaptasi terhadap digitalisasi pelayanan bagi sebagian masyarakat.

Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman kepada aparaturnya Kecamatan Kertanegara terhadap aspek pelayanan publik;
2. Meningkatkan kemampuan aparaturnya Kecamatan Kertanegara dalam penanganan konsultasi dan pengaduan.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan;
4. Melakukan inovasi pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat;
5. Mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik yang masih dibutuhkan.

**d. Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Untuk mengukur capaian sasaran Kecamatan Kertanegara "Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan" dengan indikator Indeks Pelayanan Publik Kecamatan, terdapat lima (5) program dan enam (6) kegiatan yang menunjang capaian kinerja sasaran. Program maupun Kegiatan tersebut mempengaruhi dan menunjang pencapaian sasaran, program tersebut yaitu:

Program yang menunjang tujuan tersebut yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, serta
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sedangkan kegiatan yang menunjang tujuan yaitu :

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan;
2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat;
3. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
5. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah; serta
6. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah.

**SASARAN 2**

**MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN KERTANEGARA dengan indikator Nilai SAKIP Kecamatan Kertanegara**

Capaian Kinerja Implementasi Nilai SAKIP Kecamatan capaian nilai SAKIP pada tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.16

Capaian Kinerja Sasaran Implementasi Nilai SAKIP Kecamatan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian	Target Akhir
Implementasi Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	64,25	64,26	100,01	70,00

Berdasarkan Tabel di atas-dapat diketahui bahwa nilai SAKIP Kecamatan Kertanegara pada Tahun 2025 yaitu 64,26 dari target 64,25 atau tercapai 100,01 %

Nilai Masing – masing indicator dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.17

Capaian Kinerja Sasaran Implementasi Nilai SAKIP perkomponen Tahun 2025

No	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Perencanaan Kinerja	30,00	4,20	6,30	10,50	<b>21,00</b>
2	Pengukuran Kinerja	30,00	4,20	5,40	9,00	<b>18,00</b>
3	Pelaporan Kinerja	15,00	2,10	2,70	4,50	<b>9,75</b>
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	3,50	4,50	6,25	<b>15,50</b>
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>100,00</b>	<b>14,60</b>	<b>18,45</b>	<b>29,50</b>	<b>64,26</b>

Berdasarkan tabel diatas Kecamatan Kertanegara memperoleh nilai 64,26 dengan kategori **B ( Baik )**.Penilaian tersebut menggambarkan bahwa AKIP Kecamatan Kertanegara baik, namun demikian masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.

Adapun perbandingan nilai SAKIP tahun 2025 dengan beberapa tahun yang lalu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.20

Perbandingan Nilai SAKIP Kecamatan Tahun 2025 dengan beberapa tahun yang lalu

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Target Akhir
Nilai SAKIP	Angka	55,51	61,06	63,16	64,25	64,26	100,01	70

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai SAKIP semakin tahun semakin membaik,Kecamatan Kertanegara terus berupaya dari tahun ke tahun untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.

Adapun hasil evaluasi dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

1. Masih ada Pegawai yang belum menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2025 dan Perjanjian Kinerja (PK) 2025;

2. Dokumen Ranwal Renja 2026 belum disusun
  3. Terdapat beberapa indikator kinerja program dan kegiatan yang ditetapkan pada dokumen perencanaan kinerja yakni pada Rencana Kerja 2025 belum memenuhi kriteria SMART, sebagai contoh tersedianya bahan logistik kantor yang disediakan
  4. Dalam Perencanaan Kinerja masih terdapat target yang belum didasarkan pada capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu pada indikator Nilai Kematangan Perangkat daerah dan Nilai Sakip Kecamatan
  5. Sebagian Besar Dokumen Perencanaan Kinerja belum di unggah pada website kecamatan
  6. Rencana aksi kinerja tidak berjalan dinamis karena capaian kinerja belum dipantau secara berkala dan belum dijadikan dasar pencapaian kinerja periode berikutnya;
  7. Penyusunan Pohon Kinerja belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 karena belum sesuai dengan prinsip-prinsip teknis pada saat penyusunan pohon kinerja yaitu : 1) Sudah dihubungkan dengan dokumen perencanaan; 2) Belum terlihat adanya identifikasi cross-cutting kinerja
- B. Evaluasi Atas Pengukuran Kinerja
1. Pengukuran kinerja belum menjadi strategi mencapai kinerja, belum mempengaruhi kebijakan pimpinan, serta belum mempengaruhi penyelesaian aktivitas mencapai target kinerja dilihat dari dokumen notulen dan daftar hadir rapat monitoring dan evaluasi kinerja per triwulan
  2. Informasi dan Notulensi terkait rencana aksi kinerja belum mendasarkan pada kinerja yang sebenarnya, analisa yang disajikan kurang mendalam di mana tidak membahas secara detail capaian dari rencana aksi yang dibuat dan tidak memberikan evaluasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya
  3. Aplikasi Pengukuran Kinerja e-sakip.purbalinggakab.go.id belum dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja, terutama dalam monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja Organisasi;
  4. Masih ada Pegawai yang belum mengisi e-kinerja secara konsisten;
  5. Sebagian besar hasil pengukuran capaian kinerja pegawai pada E-kinerja belum diverifikasi oleh atasan secara konsisten
  6. Aplikasi e-kinerja dan presensi belum dimanfaatkan sepenuhnya dalam pemberian penghargaan dan hukuman terutama dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai

#### C. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

1. Analisa efisiensi anggaran belum sepenuhnya disertai penjelasan mendalam bentuk konkrit upaya efisiensi yang dilakukan dalam mencapai kinerja
  2. Belum ada kegiatan sosialisasi/rapat tentang penyusunan capaian kinerja dan evaluasi LKJIP tahun sebelumnya sehingga informasi yang terdapat pada LKJIP tidak menunjukkan pelaporan kinerja kecamatan dan hanya menjadi perhatian bagi sebagian pegawai
  3. Laporan Kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi tahun berikutnya;
  4. Penutup (Bab IV) dalam Laporan Kinerja (LKJIP) belum menyampaikan analisa Keberhasilan/Kegagalan, Solusi, Rekomendasi ke depan atas kinerja yang dilaksanakan
- #### D. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja internal
1. Laporan Kinerja Tahun 2024 belum membahas upaya-upaya tindaklanjut atas rekomendasi Laporan Kinerja sebelumnya
  2. Masih terdapat rekomendasi tahun lalu yang belum dijadikan bahan perbaikan yang dijalankan secara konsisten sehingga terjadi rekomendasi berulang pada

#### Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

Keberhasilan capain nilai SAKIP tidak terlepas dari

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh ASN Kecamatan Kertanegara dalam implementasi SAKIP di Kecamatan Kertanegara
  2. Adanya Koordinasi dan komunikasi intensif antara Kecamatan Kertanegara dengan OPD terkait dalam pelaksanaan implementasi SAKIP di Kecamatan Kertanegara
- Adapun permasalahan yang ditemukan dalam penilaian SAKIP sebagai berikut :
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana terutama Teknologi Informasi
  5. Masih kurangnya pemahaman pegawai mengenai pentingnya SAKIP bagi OPD Kecamatan Kertanegara
  6. Masih kurangnya pembagian tugas dalam menyusun dokumen – dokumen yang dibutuhkan dalam SAKIP sehingga masih terfokus pada satu bagian, sehingga dokumen yang dihasilkan kurang maksimal
- Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja adalah sebagai berikut :
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    - f. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - g. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - h. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - i. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

j. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah.

## B. REALISASI ANGGARAN

Selama tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Kertanegara yang dianggarkan dalam Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025, bahwa jumlah anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21  
Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan .Kertanegara Per  
Sasaran Program Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Anggaran	Realisasi	Realisasi %
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	1.448.365.000	1.334.725.887	92,15
2	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan Kertanegara	114.327.000	113.526.800	96,88
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kertanegara	1.334.038.000	1.221.199.087	91,54

### Analisis efesisiensi penggunaan sumber daya

Dengan jumlah SDM yang terbatas ternyata Kecamatan Kertanegara mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan SDM yang ada dioptimalkan secara maksimal. Analisis Atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut

Tabel 3.21  
Tabel Analisis Atas efektifitas Penggunaan Sumber Daya  
Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran		Ket
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	94,10	95,02	100,97	1.448.365.000	1.334.725.887	92,15 Efisien
2	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan Kertanegara	3,00	2,65	88,33	114.327.000	113.526.800	96,88 Efisien
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kertanegara	64,25	64,26	100,01	1.334.038.000	1.221.199.087	91,54 Efisien

Tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran		Tingkat efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi %	
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	94,10	95,02	100,97	1.448.365.000	1.334.725.887	8,82
2	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan Kertanegara	3,00	2,65	88,33	114.327.000	113.526.800	-8,55
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kertanegara	64,25	64,26	100,01	1.334.038.000	1.221.199.087	8,47

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.22  
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian sasaran Tahun 2025

No	Tujuan/sasaran	Indikator Kierja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran	
				(Rp)	%
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Kecamatan	100,97	1.334.725.887	92,15
2.	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan Kertanegara	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Kertanegara	88,33	113.526.800	96,88
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Kecamatan Kertanegara	Nilai SAKIP Kecamatan Kertanegara	100,01	1.221.199.087	91,54

Dari tabel analisis efisiensi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kecamatan Kertanegara dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran strategis sudah efisien dalam penggunaan sumber daya dan anggaran . Hal ini dapat dilihat dari rata – rata persentase penggunaan anggaran sebesar 93,52 % .sedangkan rata – rata capaian kinerja tujuan dan sasaran sebesar 96,43 % atau dengan kategori “Sangat Tinggi” itu dapat diartikan bahwa ada efisiensi anggran dan sumber daya sebesar 2,91.

**Hasil analisis persentase rata - rata capaian kinerja tujuan dan ssaran dengan persentase penyerapan anggaran yaitu sebagai berikut :**

**1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan**

Capaian kinerja tujuan dan sasaran ini dengan indicator kinerja indeks kepuasan Masyarakat dapat dinyatakan efisiensi karena antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja terdapat efisiensi sebesar 1,86 .Efektifitas ini dapat tercapai karena Pemerintah Kecamatan Kertanegara dalam penyelenggaraan pelayanan mengoptimalkan sumber daya yang ada antara lain :

- Dengan adanya keterbatasan SDM pelaksana layanan, Pemerintah Kecamatan Kertanegara mengoptimalkan kompetensi petugas layanan melalui pembinaan internal serta evaluasi kinerja secara berkala
- Memastikan Standar Pelayanan dan SOP penyelenggaraan dapat dipahami oleh petugas layanan melalui monitoring dan evaluasi oleh pejabat yang membidangi , sehingga dalam pemberian pelayanan kepada pengguna layanan telah berpedoman pada SP dan SOP yang ditetapkan.
- Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana pelayanan yang ada.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

**1. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja**

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Perangkat Daerah, Laporan Kinerja menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong kuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, Laporan Kinerja akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja bagi Kecamatan Kertanegara juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Kertanegara Pengukuran pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2025, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA.

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kecamatan Kertanegara Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

**Simpulan Umum atas Capaian Kinerja**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi	Capaian ( 100 % )
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public di kecamatan		Indek kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	94,10	95,02	100,97
		Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan Kertanegara	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Kertanegara	Angka	3,00	2,658	88,60
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kertanegara	Nilai SAKIP Kecamatan Kertanegara	Angka	64,25	64,26	100,01

## 2. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Pemerintah Kecamatan Kertanegara. Laporan Kinerja Kecamatan Kertanegara kedepan. Meskipun Indikator Kinerja telah mencapai target bahkan satu indikator kinerja melampaui target, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat komitmen Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja.
2. Melakukan perbaikan atas revidi oleh inspektorat terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran
3. Terus berinovasi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Pemerintah Kecamatan Kertanegara dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa mendatang. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya akan menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Kertanegara, Januari 2026

Camat Kertanegara



JUJUS WAHIDDYANTORO, S.IP  
NIP. 19700822 198903 1 003